**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara Asia Tenggara pertama yang secara resmi membuka hubungan diplomatik dengan Tiongkok pada tahun 1950. Pada bulan November 1953, Indonesia dan Tiongkok secara resmi menandatangani perjanjian perdagangan pertama mereka di Beijing. China juga telah berinvestasi dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur Indonesia. China juga merupakan investor terbesar kelima di Indonesia hingga tahun 2008. (Sinaga, 2018, p. 5)

Sejak kebijakan Reformasi dan keterbukaan, perekonomian China telah mengalami pertumbuhan luar biasa selama 36 tahun. Globalisasi ekonomi dan meningkatnya kekuatan kompetitif ekonomi China telah memainkan peran yang dinilai sangat penting dalam mendorong perusahaan-perusahaan China guna memperluas investasi asing dan mempercepat transformasi mereka menjadi perusahaan global (Miao, 2016, p. 11). Bahkan Sejak awal keanggotaan China di WTO pada tahun 2001 lalu, perekonomian China terus mengalami perkembangan pesat hingga melampaui Amerika Serikat dan Jepang, kemudian inilah yang menjadikannya sebagai kekuatan ekonomi baru.

Hubungan antara Indonesia dan Tiongkok, yang telah berkembang selama 60 tahun terakhir, dianggap sangat penting bagi kedua negara. Sebagai salah satu negara terbesar di dunia, Tiongkok menarik bagi kepentingan nasional Indonesia dan memanfaatkan kemitraan strategis antara kedua negara. Bagi Indonesia, hubungan seperti itu sejalan dengan konstitusi Indonesia, yang menyerukan partisipasi negara dalam upaya pertumbuhan ekonomi negara. Sementara itu, para pelaksana kepentingan di pemerintahan Jokowi tampaknya memiliki ambisi untuk mengejar target pertumbuhan yang tinggi, yang dapat dirasakan dengan munculnya berbagai proyek infrastruktur di negara ini. Presiden Joko Widodo memang aktif dalam mengundang investasi dan pinjaman dari luar negeri agar masuk ke Indonesia. Dalam acara APEC ke-22 di Beijing pada November 2014, Presiden Jokowi secara khusus berupaya menarik investasi asing dan menawarkan dirinya sebagai penjamin untuk membantu investor asing mengatasi hambatan investasi di Indonesia. Tindakan Presiden Jokowi tersebut kemudian membuahkan hasil yang positif, salah satunya adalah meningkatnya investasi asal China di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Presiden Jokowi dalam mengundang investasi asing untuk masuk ke Indonesia telah berhasil dan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

Indonesia sedang mengalami masalah ekonomi yang sangat serius, khususnya di sektor tenaga kerja, terlepas dari upaya presiden. Bahkan, sektor ketenagakerjaan juga terkena dampak krisis ekonomi dan politik Indonesia yang dimulai pada pertengahan tahun 1990-an. Banyak usaha kecil dan menengah (UKM) mengalami kesulitan keuangan sebagai akibat dari krisis ekonomi.

Karena masalah sosial ekonomi terkait ketenagakerjaan tetap ada di Indonesia, industri ini dianggap rentan. Tingkat pendidikan tenaga kerja lokal maupun tingkat keahliannya masih relatif rendah. Selain itu, tidak ada korelasi langsung antara jumlah pekerjaan yang terbuka dan jumlah pekerjaan yang tersedia. Mengingat tenaga kerja lokal kalah bersaing dengan tenaga kerja asing, masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia akan menimbulkan masalah yang signifikan. Sementara itu, Kementerian Sumber Daya Manusia (Kemnaker) melaporkan jumlah tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia mencapai 88.271 pada tahun 2021. Jumlah ini menjadi 93.761 pada tahun 2020 dan 109.546 pada tahun 2019. Kajen Binapenta dan PKK (Ketenagakerjaan) Posisi dan Pintu Terbuka) Kerja), Suhartono, mengatakan China tetap menjadi negara pemasok tenaga ahli asing di Indonesia dengan 37.711, atau 42% dari keseluruhan. ( Safyra, 2022) Indonesia menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) ketika meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO pada tahun 1994 dan mengesahkan UU No. 7 Tahun 1994. Kewajiban anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk menyediakan negara-negara anggota terbukanya akses pasar baik untuk perdagangan barang maupun jasa merupakan salah satu aspek penting dari komitmen internasional.

Memasuki era perdagangan bebas dan globalisasi yang semakin modern, kehadiran tenaga kerja asing menjadi kebutuhan sekaligus tantangan yang tidak bisa dihindari. Indonesia masih membutuhkan spesialis asing untuk mengembangkan sumber daya manusianya, sehingga dibutuhkan tenaga asing. Namun karena kehadiran mereka diharapkan dapat meningkatkan kualitas, adanya tenaga asing tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi tenaga lokal dikarenakan menjadi kebutuhan dalam sistem pekerjaan di Indonesia.

Biasanya ada dua perspektif terkait keberadaan pekerja asing di negara seperti Indonesia. Pertama, akan bermanfaat bagi negara yang dikunjungi dari segi keberadaan TKA di Indonesia. Transfer pengetahuan dan peningkatan kualitas tenaga kerja lokal merupakan dua potensi manfaat tambahan mempekerjakan tenaga kerja asing. Sebaliknya, pihak yang berlawanan berpendapat bahwa kehadiran tenaga kerja asing akan menghambat masuknya tenaga kerja lokal dan dapat mengakibatkan keresahan sosial, seperti meningkatnya pengangguran, meningkatnya arus keluar modal, perbedaan budaya dengan norma Indonesia, dan lain-lain. faktor.

Pada umumnya mempekerjakan tenaga kerja asing dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keterampilan dan pekerjaan tertentu yang tidak dapat diisi oleh tenaga kerja lokal, mempercepat alih pengetahuan dan teknologi, serta mempercepat pembangunan nasional guna menarik lebih banyak investasi asing untuk mendukung perkembangan. di Indonesia. Tenaga ahli yang belum familiar harus memiliki pedoman kapabilitas dan kapabilitas di daerah seperti informasi, pengalaman, kemampuan di bidang tertentu, dan pemahaman budaya Indonesia. Transfer keahlian dan teknologi diprioritaskan dalam pendampingan penggunaan tenaga kerja asing sehingga tenaga kerja asing pendamping dapat menggantikan tenaga kerja asing yang didampinginya. Sesuai dengan keputusan Menteri bahwa pekerja luar atau asing tidak diperkenankan menjabat pada jabatan tertentu.

Keberadaaan tenaga kerja asing asal China dalam beberapa proyek infrastruktur di Indonesia juga harus dipertimbangkan sebagai peluang bagi terciptanya kualitas yang kompetitif bagi tenaga kerja lokal karena dengan kehadiran tenaga kerja asing khususnya dari China tentu diharapkan pula dapat melibatkan secara penuh tenaga kerja lokal sehingga nantinya dapat terjadi alih ilmu pengetahuan serta teknologi dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja lokal.

Infrastruktur merupakan dasar bagi Indonesia untuk dapat bersaing dengan negara lain. Diketahui bahwa indeks daya saing Indonesia masih berada di tengah-tengah dibandingkan dengan negara lain. Sebagai dasar pemikiran, Presiden Jokowi mengatakan, pembangunan infrastruktur memiliki *multiplier effect* yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Menurut presiden, efek jangka pendek dari pembangunan infrastruktur adalah adanya penciptaan lapangan kerja. Hal ini karena proses pembangunan secara alamiah membutuhkan keterlibatan tenaga kerja manusia sebagai elemen kunci untuk mendukung pembangunan.

Kereta Api Berkecepatan Tinggi, juga dikenal sebagai kereta cepat, adalah salah satu jenis kerja sama teknologi transportasi antara Tiongkok dan Indonesia. Program kereta cepat ini pertama kali digagas oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah kepemimpinan SBY berakhir, Presiden Joko Widodo melanjutkan program tersebut hingga saat ini. Di bawah arahan PT, salah satu proyek infrastruktur itu bernama Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Kereta Api Indonesia China (KCIC) adalah perusahaan patungan antara PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), grup Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia, dan Beijing Yawan High Speed Railway Co Ltd, grup perusahaan kereta api China. Kemitraan khusus ini juga berfokus pada pengembangan teknologi transportasi darat di sektor angkutan umum melalui skema *business-to-business* (B2B).

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, sebuah perusahaan patungan antara Indonesia dan Cina senilai $5,5 miliar, dibuka pada Oktober 2015. Proyek ini akan membangun rel kereta api sepanjang 142 kilometer dengan empat perhentian dari Jakarta ke Bandung: Stasiun Tegalluar di Bandung, Stasiun Karawang di Jakarta, Stasiun Halim di Jakarta. Kereta akan menempuh jarak antara 200 dan 250 kilometer per jam. Pekerja asing yang berbasis di China juga dipekerjakan dalam proyek ini karena prosedurnya membutuhkan manajemen ahli yang tepat dan komprehensif. Jumlah tenaga kerja asing China yang bekerja di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kurang lebih 2.000 orang, demikian disampaikan Menteri Tenaga Kerja RI, Ida Fauziah. Angka ini mewakili sekitar 16,66% dari jumlah tenaga kerja proyek yang mencapai 12.000 orang. Tentu saja, penggunaan tenaga kerja asing masih terbilang rendah, mengingat proyek ini memiliki 10.000 pekerja lokal. (CNN, 2020)

Hubungan antara Indonesia dan China dalam proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB) merupakan salah satu bentuk kerjasama dengan adanya proses alih ilmu pengetahuan yang berkelanjutan, karena bahkan setelah berakhirnya izin kerja untuk pekerja asing, jika proyek masih berlangsung, sebagian besar pekerjaan masih akan dilakukan oleh pekerja lokal, tentu dengan mengunakan ilmu pengetahuan & teknologi yang sebelumnya diterapkan oleh tenaga kerja asing. Di kota Bandung sendiri, komposisi angkatan kerja pada Agustus 2021 terdiri dari 1.185.623 orang penduduk yang bekerja dan 153.505 orang pengangguran dengan paling banyak yang berstatus buruh/karyawan/pegawai sebanyak 634.502 orang atau sebesar 53,52 persen dari total jumlah angkatan kerja di kota Bandung. (Bandung, 2021)

Kemudian inilah yang membuat topik tersebut begitu menarik untuk diteliti, mengingat mayoritas proyek pembangunan di Indonesia kerap kali merekrut pekerja asing sebagai penunjang dalam upaya alih ilmu pengetahuan & teknologi sehingga akan membahas lebih jauh mengenai sejauh mana peran dari tenaga kerja asing tersebut dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal melalui alih IPTEK dengan penelitian saya dengan judul **“Peran Tenaga Kerja Asing (TKA) China Dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Lokal di Kota Bandung Melalui Penerapan Alih Ilmu Pengetahuan & Teknologi (IPTEK) Pada Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB).”**

1. **Identifikasi Masalah**

Untuk memudahkan menganalisis masalah, penulis mengidentifikasinya sebagai berikut, berdasarkan konteks masalah sebelumnya:

1. Bagaimana kualitas tenaga kerja lokal di kota Bandung?
2. Bagaimana tenaga kerja asing di Indonesia?
3. Bagaimana peran dari tenaga kerja asing China dalam menerapkan alih ilmu pengetahuan & transfer teknologi pada proyek kereta cepat Jakarta - Bandung?
   * 1. **Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka pencipta ingin membatasi persoalan tersebut agar perbincangan dalam kajian ini lebih mendalam. Melalui penerapan alih ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta – Bandung (KCJB) tahun 2016 hingga 2022, kajian ini akan dibatasi pada peran tenaga kerja asing China dalam mempengaruhi kualitas tenaga kerja lokal di Bandung.

* + 1. **Perumusan Masalah**

Untuk memudahkan pembahasan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut, berdasarkan penjelasan masalah di atas:

**“Bagaimana Tenaga Kerja Asing (TKA) China Dapat Berperan Dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Lokal Melalui Penerapan Alih Ilmu Pengetahuan & Teknologi (IPTEK) Pada Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB)”**

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
   * 1. **Tujuan Penelitian**

Berikut adalah kegunaan dan tujuan yang diharapkan dari sebuah proyek penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan negara:

1. Untuk mengetahui kualitas tenaga kerja lokal di kota Bandung
2. Untuk mengetahui tenaga kerja asing di Indonesia
3. Untuk mengetahui peran serta kontribusi dari adanya tenaga kerja asing China dalam membangun kualitas tenaga kerja di kota Bandung pada proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta – Bandung (KCJB)
   * 1. **Kegunaan Penelitian**

Berikut ini adalah beberapa aplikasi potensial dari penelitian ini, yang didasarkan pada tujuan yang telah diuraikan oleh penulis penelitian di atas:

1. Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan bagaimana transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) berkontribusi pada peningkatan kualitas tenaga kerja Bandung melalui kontribusi tenaga kerja asing Cina.
2. Kegunaan praktis dalam penelitian ini, diantaranya:
3. Menghasilkan karya ilmiah yang merupakan salah satu syarat kelulusan Program Sarjana Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pasundan Bandung.
4. Memiliki potensi untuk memberi manfaat bagi akademisi, penulis khususnya, masyarakat, dan akademisi secara keseluruhan; Dan
5. Secara khusus, dapat menjadi referensi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian tambahan tentang peran TKA Cina dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja di Bandung sebagai bagian dari proyek pembangunan Kereta Api. Bandung ke Jakarta cepat (KCJB)